

**PERAN PPATK SEBAGAI FIU (*FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT*) DALAM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI UPAYA
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

Muhammad Faizal

Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Peran PPATK sebagai FIU (*Financial Intelligence Unit*) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia”, dengan tujuan mengetahui dan memahami pengaturan hukum PPATK sebagai FIU (*Financial Intelligence Unit*) di Indonesia, dan peran PPATK sebagai FIU (*Financial Intelligence Unit*) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai upaya penegakan hukum di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan Penelitian Normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menguji data kepustakaan untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, terlebih pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus mengenai Peran PPATK sebagai FIU (*Financial Intelligence Unit*) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* di Indonesia adalah UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU). Peran PPATK sebagai FIU (*Financial Intelligence Unit*) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai upaya penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang penting karena mencari bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya TPPU berdasarkan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dan selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersebut, PPATK menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik TPPU untuk ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan

Kata Kunci: Peran; PPATK; Pencegahan; Pemberantasan; Tindak Pidana Pencucian Uang

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Adrian Sutedi, "*Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*". Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Andry Mahyar, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pusat Pelaporan Dan Nalisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*", Medan, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2011

AR. Mustopadidjaja, 2014, "*Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN*", Makalah.

Alvin S Johnson. *Sosiologi Hukum*. RinekaCipta. Jakarta. 2004

Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia* (Bandung : BooksTerrace & Library, 2008),

C.F.G. Sunaryati Hartono. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Bina Cipta. Jakarta. 1976

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,

Fakultas Hukum UNİYAP, 2011. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Fakultas Hukum UNİYAP, Jayapura.

Guy Stessens, *Money Laundering A New International Law Enforcement Model*, (Cambridge: University Press, 2000)

Ramly Hutabarat. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985.

Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.

Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983

_____ *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta. 1990.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2007

Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2000

Zulkarnain Sitompul, *Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang : Upaya Kerjasama Internasional*, Bahan Makalah Seminar, Semarang

Internet :

<https://materimahasiswahukumindonesia.blogs>

Perundang-undangan

UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU)